

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Usaha Perbankan Studi Perbandingan Antara Bank Pemerintah dan Swasta Nasional di Indonesia  
Ketua Peneliti : I Made Sudana  
Anggota Peneliti : R. Ismail Noerawan  
Nugroho Sasikirono  
Fakultas/Puslit : Ekonomi Universitas Airlangga  
Sumber Biaya : DRK/DPP UNAIR 1995/1996  
SK Rektor Universitas Airlangga  
Nomor 7131/PT.03.H/N/1995  
Tanggal 25 Agustus 1995

---

Ditinjau dari sudut kepemilikan, secara garis besar usaha perbankan dapat dikelompokkan menjadi bank pemerintah dan bank swasta. Bank swasta secara lebih khusus dapat dikelompokkan lagi menjadi bank swasta nasional, bank swasta asing dan bank swasta campuran. Perbedaan kepemilikan bank mempunyai konsekuensi pada perbedaan pola manajemen usaha perbankan yang bersangkutan, dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja yang berhasil dicapai oleh masing-masing bank. Masalahnya adalah, apakah ada perbedaan yang bermakna antara kinerja bank pemerintah dibandingkan dengan bank swasta nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, hipotesis yang dikemukakan adalah terdapat perbedaan yang bermakna kinerja bank pemerintah dibandingkan dengan bank swasta nasional, periode 1988 - 1992.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kinerja antara usaha perbankan milik pemerintah dibandingkan dengan usaha perbankan milik swasta nasional.

Penelitian ini dilakukan terhadap bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta nasional di Indonesia pada periode 1988 - 1992. Jumlah bank pemerintah yang diteliti sebanyak 17 bank dan bank swasta nasional sebanyak 20 bank, yang ditentukan dengan cara purposif. Analisis perbedaan kinerja dilakukan dengan metode analisis perbandingan perbedaan rata-rata dua sampel.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja likuiditas kelompok bank pemerintah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, namun perbedaannya tidak selalu bermakna. Perbedaan yang bermakna terjadi pada tahun 1988, 1989, 1992, sedangkan pada tahun 1990 dan 1991 perbedaannya tidak bermakna.
2. Kinerja rasio modal kelompok bank pemerintah selalu lebih besar dibandingkan dengan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, namun perbedaannya tidak bermakna.
3. Kinerja rasio spread yang diukur dengan interest margin kelompok bank pemerintah selalu lebih besar dibandingkan dengan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, namun demikian perbedaan tidak bermakna.
4. Kinerja produktivitas karyawan kelompok bank pemerintah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas karyawan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, dan perbedaannya sangat bermakna.
5. Kinerja efisiensi biaya kelompok bank pemerintah selalu lebih rendah dibandingkan dengan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, dan perbedaannya sangat bermakna.
6. Kinerja fee based income kelompok bank pemerintah berbeda dibandingkan dengan bank swasta nasional, tetapi perbedaannya tidak selalu konsisten. Fee based income bank pemerintah lebih besar dibandingkan dengan bank swasta nasional terjadi pada tahun 1989 dan 1992, sedangkan pada tahun 1988, 1990, dan 1991 fee based income bank pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan bank swasta nasional. Perbedaan yang bermakna hanya terjadi pada tahun 1991.
7. Kinerja return on assets (ROA), kelompok bank pemerintah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bank swasta nasional pada periode 1988 - 1992, dan perbedaannya sangat bermakna.
8. Bank pemerintah lebih dari bank swasta nasional karena:
  - a. Bank pemerintah memiliki jaringan usaha yang luas dan jumlah karyawan yang cukup banyak.
  - b. Bank pemerintah mampu menetapkan suku bunga deposito lebih rendah dan suku bunga kredit lebih tinggi daripada bank swasta nasional. Hal ini mengakibatkan efisiensi biaya dan ROA bank pemerintah menjadi lebih tinggi bila dibandingkan dengan bank swasta nasional.
  - c. Kepercayaan masyarakat kepada bank pemerintah lebih tinggi bila dibandingkan dengan bank swasta nasional.
  - d. Dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam operasi bank pemerintah masih sangat besar.
9. Bank swasta nasional lebih unggul daripada bank pemerintah dalam hal :
  - a. Bank swasta nasional lebih inovatif dibandingkan bank pemerintah. Perkembangan tabungan khusus, investasi di bidang beberapa teknologi untuk dunia perbankan (misalnya komputerisasi) dan pelatihan yang meningkat terhadap fee based income adalah beberapa contoh yang menunjukkan lebih tanggapnya bank swasta nasional terhadap perubahan lingkungan.

b. Evaluasi dan pengawasan kredit yang cukup ketat oleh bank-bank swasta nasional mencegah timbulnya kredit macet yang tinggi. Walaupun untuk itu bank swasta nasional kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.

Dengan memperhatikan kesimpulan yang telah dikemukakan di ajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dalam dunia perbankan, maka diperlukan usaha-usaha sebagai berikut :
  - a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan perbankan yang dikeluarkan pemerintah.
  - b. Pemerintah harus menjamin perlakuan yang sama terhadap bank pemerintah dan bank swasta nasional, terutama yang berkenaan dengan peraturan mengenai pengalihan status bank-bank pemerintah.
2. Agar kepentingan masyarakat luas dapat terjamin, maka pemerintah perlu memperketat peraturan yang membatasi jumlah penyaluran kredit oleh bank untuk perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok usaha.
3. Bank pemerintah perlu lebih inovatif, terutama dalam mengembangkan produk-produk dan sistem pelayanan dalam dunia perbankan.
4. Pemerintah hendaknya tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang menimbulkan beban berganda bagi bank-bank, seperti peraturan mengenai CAR dan LDR yang disertai dengan Gebrakan Sumarlin II pada tahun 1991,